

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, 2002, *“pelajaran hukum pidana, bagian 1: stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Yudha Hermoko, 2010, *“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*, Kencana, Jakarta.

Alam, 2010, *Penghantar Kriminologis*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2016, *“Penghantar Metode Penelitian Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jhoni Ibrahim, 2007, *“Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative”*, Bayu Media Publishing, Malang.

Joenedi Effendi Dan Johny Ibrahim, 2016, *“Metode Penelitian Hukum”*, Prenada Media Group, Depok.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung.

Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Mahfud, MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.



Sintong Silaba, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramata Publishing, Bekasi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Jurnal/Skripsi**

Beriyansyah, 2017, "*Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung.

Khairu Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu", Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.12, Nomor 2 Juni 2015.

Khoiri Yaningsih, 2014, "*Akseibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi Penyandang Disabilitas Dikabupaten Selemam, Daerah istimewa Yogyakarta*", Skripsi, Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

### **Situs Internet**

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-arna-pemilukanda/>

[shk.uui.ac.id/2018/03/mengenal-pelanggaran-pilkada/](http://shk.uui.ac.id/2018/03/mengenal-pelanggaran-pilkada/)

